



PEDOMAN TEKNIS

Pelaksanaan Inovasi di Kabupaten Bangka



bangka.go.id



Pemerintah Kabupaten Bangka



[pemkab.bangka](https://www.instagram.com/pemkab.bangka)

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Karunia-Nya sehingga Buku Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Inovasi daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yang menjamin setiap instansi pemerintah dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya *good governance*.

Pembentukan Laboratorium Inovasi Daerah ini bertujuan menggali ide-ide inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Bangka yang untuk keberhasilannya diperlukan kerjasama tim inovatif serta seluruh pihak.

Diharapkan Laboratorium ini mampu menumbuhkembangkan upaya Inovasi daerah, sebagai wadah untuk seluruh OPD Se-Kabupaten Bangka berkoordinasi mengembangkan, meningkatkan kualitas Inovasi yang sudah berjalan dan yang rencananya akan dilaksanakan demi memberikan pelayanan publik yang prima kepada seluruh masyarakat.

Keberhasilan dalam penyusunan buku Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Bangka ini terlaksana dengan baik berkat dukungan berbagai pihak. Atas dukungan dan partisipasinya dalam penyusunan buku ini diucapkan terima kasih. Besar harapan kami buku ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menciptakan Inovasi Daerah yang lebih inovatif.

Sungailiat, November 2019

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKA,



Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.SI
NIP. 19661214 199203 1 004

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Karunia-Nya sehingga Buku Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Inovasi daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yang menjamin setiap instansi pemerintah dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya *good governance*.

Pembentukan Laboratorium Inovasi Daerah ini bertujuan menggali ide-ide inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Bangka yang untuk keberhasilannya diperlukan kerjasama tim inovatif serta seluruh pihak.

Diharapkan Laboratorium ini mampu menumbuhkembangkan upaya Inovasi daerah, sebagai wadah untuk seluruh OPD Se-Kabupaten Bangka berkoordinasi mengembangkan, meningkatkan kualitas Inovasi yang sudah berjalan dan yang rencananya akan dilaksanakan demi memberikan pelayanan publik yang prima kepada seluruh masyarakat.

Keberhasilan dalam penyusunan buku Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Bangka ini terlaksana dengan baik berkat dukungan berbagai pihak. Atas dukungan dan partisipasinya dalam penyusunan buku ini diucapkan terima kasih. Besar harapan kami buku ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menciptakan Inovasi Daerah yang lebih inovatif.

Sungailiat, November 2019

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKA,



Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
NIP. 19661214 199203 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	7
Ruang Lingkup	8
Landasan Hukum	8
Sistematika	9
BAB II Inovasi Pemerintah Daerah	11
Teori Inovasi	13
Kondisi Inovasi Pemkab Bangka	18
Pemanfaatan Laboratorium Inovasi	33
BAB III Manajemen Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Bangka	36
Fungsi Planning	37
Fungsi Organizing	39
Fungsi Directing	40
Fungsi Controlling	41
Unsur- unsur Manajemen Dalam Lasida Kabupaten Bangka	42
BAB IV Penutup	
Kesimpulan	53
Rekomendasi	54



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

INOVASI JALAN UTAMA

Inovasi bukan lagi alternatif tetapi menjadi jalan utama yang harus ditempuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pengertian Inovasi adalah suatu kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang dilakukan untuk pengembangan penerapan praktis nilai konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku inovatif, antara lain kepemimpinan, kelompok kerja, gaya pemecahan masalah, dan iklim organisasi. Perilaku inovatif dideskripsikan sebagai penciptaan yang disengaja, pengenalan, dan penerapan ide-ide baru dalam peran kerja, kelompok atau organisasi, dalam rangka memperoleh manfaat kinerja. Perilaku inovatif tidak hanya mencakup pengembangan ide-ide baru dan kreatif tetapi juga meliputi pelaksanaannya.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara melalui aparaturnya wajib melayani setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara, yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan kebutuhan dasar.

Inovasi Daerah bersumber dari lima unsur, yakni Kepala Daerah, DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Daerah dan Masyarakat. Jadi, dalam suatu Pemerintahan sangatlah penting dari kelima unsur tersebut demi terlaksananya suatu Inovasi di suatu Daerah. Inovasi merupakan salah satu hal yang harus selalu dilakukan untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik, tidak terkecuali pada organisasi non profit seperti pemerintah. Maka dari itu organisasi dituntut untuk selalu memiliki inovasi tinggi untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Keberhasilan dalam mengembangkan organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia. Proses inovasi ini terjadi secara terus menerus didalam kehidupan manusia karena adanya keinginan untuk melakukan sesuatu menjadi lebih mudah dan cepat.

Warga negara menginginkan penyelenggaraan negara yang *good governance*, yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan,

akuntabel, dan bertanggung jawab. Eksistensi pemerintahan yang baik atau *good governance* yang selama ini sangat didambakan oleh masyarakat masih jauh dari harapan, bahkan hanya di angan-angan. Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan publik.

Inovasi merupakan salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi. Akan tetapi, inovasi belum menjadi hal utama dari budaya birokrasi di Indonesia. Inovasi di dunia pemerintahan akan sulit dilakukan apabila masih banyak pegawai yang tidak terpacu untuk berubah. Membentuk pemerintahan yang inovatif tampaknya masih belum optimal mengingat kesadaran untuk selalu berinovasi masih menyisakan ruang untuk perbaikan. Padahal inovasi sangat penting untuk dilakukan pada setiap lapisan pemerintahan demi tercapainya pemerintahan yang baik atau "*good governance*".

Salah satu cara untuk mengembangkan *good governance* adalah dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemerintahan, dimulai dari tingkat individu, meningkat kepada kelompok, dan kemudian menuju pada inovasi organisasi. Tujuannya agar seluruh pihak di tempat kerja mampu mengembangkan keterampilan yang dapat mempermudah dalam melakukan setiap pekerjaannya.

Inovasi daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yang menjamin setiap instansi pemerintah dapat melakukan

berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya proses *good governance*.

Kreativitas merupakan pengembangan ide baru, dan inovasi merupakan proses penerapan ide tersebut secara nyata ke dalam praktik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh para inovator adalah suksesi kepemimpinan. Inovasi yang berhasil dilakukan memakan waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika pemimpin yang mendukung dan mengarahkan hasil inovasi tersebut pergi sebelum prosesnya selesai, maka inovasi tersebut berada dalam risiko. Jika pemimpin baru tidak menyetujui atau memahami strategi inovasi tersebut, maka keberhasilannya terancam terhenti.

Kabupaten Bangka sejak 5 tahun terakhir sangat gencar melakukan perbaikan pelayanan publik melalui berbagai terobosan inovasi. Inovasi dalam hal ini digunakan untuk mengatasi gap-gap yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Inovasi Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka setiap tahunnya berasal baik dari Proyek Perubahan oleh Pejabat yang menjalankan tugas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) maupun yang diciptakan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Bangka merupakan Kabupaten yang telah banyak meraih berbagai Penghargaan dari Inovasi Daerah ini, baik penghargaan

yang diselenggarakan oleh kementerian maupun pihak Swasta. Inovasi Daerah yang baru-baru ini diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu Penghargaan Top 45 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) dari KemenPAN-RB untuk Aplikasi “Ransel si Dora” tahun 2019 yang merupakan aplikasi pelayanan kebutuhan darah (Rangkul Calon Pendor, Stok Darah Terintegrasi Dalam Aplikasi Donor Darah) yang juga menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan dan INDONESIA HEALTHCARE FORUM (IndoHCF). Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Bupati Bangka sebagai Pemerintah Daerah dengan Pelayanan dan pengelolaan PSC atau Pelayanan Penanggulan Kegawatdaruratan terbaik dan terinovatif di Indonesia mengalahkan Kabupaten Cirebon, Bantul, dan Tulungagung sehingga mendapatkan Platinum Award dan sekaligus pemenang favorit pilihan netizen Indonesia.



Sumber : <http://bappeda.bangka.go.id>



Sumber : <http://bappeda.bangka.go.id>

Sebagai upaya pengembangan inovasi lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggagas pembentukan Laboratorium Inovasi Daerah. Laboratorium Inovasi ini merupakan program pendampingan, asistensi dan fasilitasi guna mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran, semangat dan aksi nyata inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka di sektor publik. Laboratorium Inovasi ini juga diperlukan untuk memonitoring dan mengevaluasi Inovasi-inovasi yang sudah diciptakan dan dilaksanakan untuk memastikan inovasi-inovasi tersebut selalu berkembang dan disesuaikan dengan perubahan kondisi yang dinamis.

Laboratorium inovasi dirancang sebagai wadah untuk menghasilkan ide-ide dan pengetahuan baru melalui tahapan sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi (SECI) yang dikembangkan dari metode proses *Social Innovation* menjadi metode

5D. Metode tersebut merupakan tahapan proses Laboratorium Inovasi, yang terdiri dari:

- Menginspirasi pengambil kebijakan untuk mau berinovasi dan mau menggalang dukungan untuk berinovasi(**Drum Up Support**);
- Menggali ide-ide inovasi untuk mewujudkan visi atau impiannya (**Diagnose**);
- Merancang rencana aksi inovasi yang komprehensif (**Design**);
- Melaksanakan inovasi secara fokus dan konsisten (**Deliver**); dan
- Menyampaikan proses dan manfaat inovasi kepada Stakeholder atau lingkungannya(**Display**).

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibentuknya Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka adalah sebagai wadah pemberdayaan, pembelajaran, dan pengembangan serta wadah penyebarluasan ide-ide kreatif, gagasan, dan terobosan pelayanan publik guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu dengan Laboratorium Inovasi ini juga diharapkan mampu menghasilkan Inovasi Daerah yang mampu bersaing di Tingkat Nasional baik yang diselenggarakan oleh Pihak Kementerian maupun pihak Swasta.

Tujuan dari pembentukan Laboratorium Inovasi Daerah ini adalah:

1. Untuk menggali ide-ide inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah;

2. Untuk mengumpulkan berbagai Inovasi yang telah diciptakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
3. Untuk memonitoring, mengevaluasi dan menganalisis pengembangan inovasi yang sudah berjalan untuk perbaikan dan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan layanan publik;
4. Untuk memberikan rekomendasi terkait pemanfaatan dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah.

RUANG LINGKUP

Adapun Ruang Lingkup Kerja dari Laboratorium Inovasi Daerah ini adalah penatalaksanaanInovasi yang ada dan berkembang di Kabupaten Bangka.

LANDASAN HUKUM

Pembentukan Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka disusun berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
7. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.

SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Dokumen Pengembangan Manajemen Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka terdiri dari 4 (empat) BAB yang dapat dirumuskan secara singkat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II INOVASI PEMERINTAH DAERAH

Berisikan penjelasan tentang Teori Inovasi, Kondisi Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Pemanfaatan Laboratorium Inovasi.

BAB III MANAJEMEN LABORATORIUM INOVASI

Berisikan penjelasan mengenai Struktur Organisasi Pengembangan Inovasi, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Metode Pelaksanaan, Penganggaran dan Sasaran Pemanfaatan Laboratorium Inovasi.

BAB IV PENUTUP

Berisikan penjelasan tentang Kesimpulan dan Saran serta Rekomendasi.



BAB II INOVASI PEMERINTAH DAERAH

” kita semua coba keluar rutinitas business as usual, monoton, sekali lagi agar kita membawa tradisi-tradisi baru, pola baru, cara baru”

(Joko Widodo - finance.detik.com – 5 Desember 2015)

Perubahan-perubahan dalam tataran global, persaingan dan pasar disebabkan perubahan teknologi yang pesat, terintegrasinya ekonomi internasional, semakin membaik pasar di negara maju, dan jatuhnya rezim komunisme dan sosialisme. Perubahan-perubahan dalam tataran global tersebut menimbulkan ancaman dan tantangan bagi setiap bangsa dan negara serta pemerintahan, termasuk masyarakat. Ancaman ditimbulkan terjadinya peningkatan kompetisi domestic, kecepatan kominukasi, dan kompetisi internasional. Tantangan ditimbulkan karena bertambahnya pasar, berkurangnya hambatan, dan lebih terbukanya pasar internasional.

Secara internal, ancaman dan tantangan akan mendorong terjadinya perubahan organisasi dalam skala yang lebih luas, meliputi rekayasa, jejaring, tim dan pengorganisasian horizontal, kualitas program, produk dan

teknologi baru, merger, joint venture, konsorsium, tim global, perubahan strategis, dan perubahan budaya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut harus berpegang pada efisiensi dan efektivitas yang secara berkelanjutan terus ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kemajuan pembangunan yang dicapai pemerintah daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen tinggi dan senantiasa mendorong, mendukung, memfasilitasi, memacu kreativitas serta memberi apresiasi dan reward yang terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang telah memajukan daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Pemerintah daerah perlu memberikan perlindungan atas inovasi yang dihasilkan aparatur sipil negara di daerah. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Komitmen atas adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat harus dilaksanakan nyata. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam

prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

2.1 Teori Inovasi

2.1.1 Definisi Inovasi

Inovasi merupakan sarana utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Oleh karena itu, inovasi menjadi bagian integral dari strategi meningkatkan efektivitas dan eksekusi organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan-tujuan jangka menengah dan panjang organisasi. Pengembangan inovasi oleh pemerintah daerah memiliki 4 sasaran yaitu:

- Meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
- Terciptanya penguatan pemerintah daerah secara organisasional
- Tersedianya lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan maksimal pemerintah daerah

Ensiklopedi Wikipedia (<http://en.wikipedia.org/wiki/innovation>) menyebutkan bahwa inovasi adalah tindakan memperkenalkan sesuatu yang baru dan mencakup :

- Sesuatu yang baru diperkenalkan
- Pengenalan sesuatu hal baru
- Sebuah gagasan (ide), metode atau alat baru
- Pemanfaatan (eksploitasi) yang berhasil atas gagasan-gagasan baru
- Perubahan yang menghasilkan sebuah dimensi baru dari kinerja
- Proses untuk melakukan perbaikan-perbaikan dengan cara memperkenalkan sesuatu hal baru.

Menurut Assink (2016:2160, inovasi didefinisikan sebagai proses menciptakan sesuatu yang baru secara berhasil yang mempunyai nilai

signifikan bagi unit layanan yang mengadopsinya. Jones (2004) menyatakan bahwa inovasi adalah proses dimana organisasi menggunakan keahlian dan sumberdayanya untuk mengembangkan produk barang dan jasa yang baru atau untuk mengembangkan sistem produksi dan operasi yang baru sehingga organisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada konsumen.

Jones menyatakan bahwa perubahan teknologi merupakan sumber utama terjadinya inovasi. Teknologi didefinisikan sebagai keterampilan, pengetahuan, pengalaman, peralatan, dan mesin yang digunakan untuk mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan produk barang dan jasa. Teknologi merupakan jantungnya proses inovasi.

Perubahan teknologi memegang peranan penting dalam mendorong terjadinya perubahan lingkungan. Teknologi dapat berubah secara cepat, drastis, dan mendasar, namun juga insidental.

Perubahan teknologi memaksa organisasi untuk melakukan perubahan-perubahan agar tetap mampu bertahan dan sukses dalam persaingan. Akibat perkembangan teknologi maka daur hidup suatu produk menjadi semakin pendek dan ini berarti adalah tantangan untuk setiap organisasi untuk memperkuat kegiatan penelitian dan pengembangan.

Andrall E. Pearson (2003) mengemukakan ciri-ciri organisasi yang kondusif bagi inovasi sebagai berikut :

1. Pimpinan puncak menciptakan dan memperthankan sebuah lingkungan organisasi yang menghargai perubahan dan inovasi sebagai jalan untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi
2. Struktur organisasi mendorong meunculnya gagasan-gagasan inovatif
3. Organisasi senantiasa memhami dinamika persaingan dalam lingkungan operasinya dan dapat mengusahakan inovasi-inovasi secara realistic
4. Organisasi dapat dengan mudah dan tepat menemukan sumber-sumber inovasi, baik pada pihak-pihak di dalam maupun di luar organisasi

5. Organisasi mendukung gagasan-gagasan yang baik dengan kecepatan penuh dan dukungan sumber daya organisasi sepenuhnya.

Paul M. Romer (2006) menyatakan bahwa inovasi sebagai proses menciptakan dan menyalurkan nilai-nilai baru kepada pelanggan. Beberapa inovasi adalah terobosan teknologi (penciptaan transistor), penemuan baru, model bisnis baru, proses produksi baru, dan desain baru.

Daft (1998) menyatakan bahwa inovasi dibedakan atas 2 tipe, yaitu inovasi struktur administrative, dan inovasi teknologi. Inovasi struktur administrative adalah inovasi yang dilaksanakan pada tingkatan administrasi dengan arah perubahan ke bawah (top down). Inovasi teknologi adalah inovasi yang dilaksanakan pada tingkatan operasional dan produksi dengan arah perubahan ke atas (bottom up).

Gareth Jones mendefinisikan inovasi sebagai suatu proses di mana organisasi menggunakan keahlian dan sumber dayanya untuk mengembangkan barang dan jasa atau untuk mengembangkan sistem produksi dan operasi sehingga mereka dapat memberikan tanggapan atas tuntutan konsumen secara lebih baik. Walaupun inovasi menjanjikan perubahan, inovasi perlu dikelola dengan baik sebab inovasi selalu berhubungan dengan resiko yang tinggi karena outcome dari aktivitas riset dan pengembangan biasanya masih belum pasti. Inovasi selalu dimulai dengan kreativitas, yaitu dimulai dengan memikirkan hal-hal yang belum pernah ada. Proses ini kemudian diikuti dengan proses mewujudkan konsep-konsep baru.

Bean dan Radford (2002) menyatakan bahwa kapasitas inovasi dari sebuah organisasi dapat berkembang melalui tiga jalur, yaitu (1) inovasi-inovasi produk; (2) inovasi-inovasi proses; dan (3) inovasi-inovasi manajemen atau organisasi.

2.1.2 Jenis - Jenis Inovasi

Dalam konteks pemerintah daerah sebagai organisasi sector public, inovasi dapat meningkatkan daya saing, perbaikan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Melalui penghimpunan, pengembangan dan penerapan gagasan-gagasan, organisasi sector public dapat memperkenalkan produk, layanan, proses dan teknik baru dalam memberikan pelayanan masyarakat dengan memuaskan. Inovasi memerlukan berbagai aktivitas seperti gagasan-gagasan cemerlang, system-sistem pembelajar, pelatihan, riset dan pengembangan, komersialisasi teknologi, budaya perusahaan dan semangat kewirausahaan.

Lee Zhuang dalam Glor (1995) mengemukakan bahwa inovasi organisasi sector public mencakup 4 dimensi , yaitu (1) aktivitas-aktivitas atau gagasan-gagasan unik dan baru; (2) orang-orang yang melakukan inovasi; (3) memperbaiki proses yang telah ada; dan (4) diseminasi aktivitas-aktivitas atau gagasan-gagasan baru.

Inovasi organisasi sector public menunjukkan adanya peralihan dari paradigma yang ada selama ini dan menemukan atau menerapkan cara-cara pandang baru, di mana proses menjadi aspek paling penting dalam penerapan inovasi. Inovasi memerlukan pengelolaan yang sungguh-sungguh maka individu-individu dalam organisasi yang memiliki bakat dan keterampilan berinovasi menjadi asset paling penting. Disamping dimensi paradigma dan individu inovatif, inovasi pada organisasi public juga memerlukan upaya perbaikan proses dan fungsi dengan cara-cara yang baru, dan penyebarluasan gagasan baru untuk diadopsi oleh orang-orang dan organisasi.

Ensiklopedia Wikipedia mengemukakan bahwa inovasi diklasifikasikan atas 12 inovasi yaitu : (1) inovasi model bisnis; (2) inovasi pemasaran; (3) inovasi organisasional; (4) inovasi proses; (5) inovasi produk; (6) inovasi pelayanan; (7) inovasi rantai pasokan; (8) inovasi substansial; (9) inovasi keuangan; (10) inovasi incremental; (11) inovasi terobosan; dan (12) inovasi system-sistem teknologi baru.

Berdasarkan luasnya perubahan yang dituntut pada proses-proses organisasi dan produk, Mantel Dkk dalam Wilfridus (2009), inovasi dibedakan atas atas proyek derivative, platform, terobosan, dan proyek litbang. Berdasarkan tingkat kebaruannya, Assinks (2006) menyatakan bahwa inovasi mencakup inovasi incremental hingga inovasi terobosan. Inovasi incremental dilakukan dengan melakukan modifikasi berdasarkan teknologi, proses atau konsep yang sudah ada dan diperuntukan pada pasar atau kelompok layanan yang sudah ada.

2.1.3 Manajemen Inovasi Organisasi

Inovasi organisasi merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh organisasi untuk membantu organisasi dalam menyesuaikan diri dan atau menciptakan t realitas-realitas baru. Inovasi tidak dipandang sebagai urusan orang per orang di dalam organisasi, namun menjadi urusan dari berbagai kelompok dalam organisasi dan urusan dari seluruh organisasi. Inovasi organisasi memerlukan pengelolaan terpadu. Inovasi menjadi tanggung jawab dari setiap pimpinan atau administrator pada setiap lapisan, baik pada level operasional, fungsional, maupun pada level madya dan puncak.

Pengelolaan inovasi organisasi merupakan bagian dari manajemen strategis organisasi. Inovasi menjadi prasyarat bagi kelangsungan hidup organisasi. Pengelolaan inovasi organisasi diarahkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan berbagai kelompok kepentingan organisasi dengan memuaskan. Pengelolaan inovasi dalam upaya untuk mendukung reformasi dan transformasi social di segala bidang kehidupan masyarakat. Cara pandang ini menekankan efisiensi sebagai sasaran strategis dari inovasi organisasi.

Bean & Radford (2002) mengemukakan strategi inovasi menyeluruh melalui pengembangan manajemen inovasi komprehensif. Model manajemen inovasi ini menempatkan tim-tim operasional sebagai ujung tombak keberhasilan organisasi dan didukung oleh system-sistem lainnya dalam seluruh lapisan organisasi.

Inovasi sesungguhnya adalah suatu proses utuh menyangkut penemuan peluang atau permasalahan, penemuan dan pengembangan jalan keluar dalam bentuk barang atau jasa, serta implementasinya. Kevin C. Desouza (2007) mengemukakan bahwa inovasi yang berhasil diperoleh melalui 5 tahapan yaitu (1) perolehan gagasan dan mobilisasi; (2) advokasi dan pemilahan (screening); (3) eksperimentasi; (4) komersialisasi; dan (5) difusi dan implementasi.

2.2 KONDISI INOVASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA

Inovasi adalah keniscayaan, daerah diharapkan dapat memacu kinerjanya dengan inovasi-inovasi yang akan dihasilkan. Berbagai macam inovasi yang sudah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Inovasi pemerintah Kabupaten Bangka terbagi menjadi 4 kategori diantaranya sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan penyelenggara pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkinerja tinggi
2. Kolaborasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik
3. Pelayanan publik inklusif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat

2.2.1. Inovasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan Penyelenggara Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien dan Berkinerja Tinggi

A. SIMPANAN CANTIK

RSUD Depati Bahrin merupakan bagian terpadu dari Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bangka secara tidak langsung turut serta dalam pembangunan sumber daya manusia yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka khususnya dan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya, yaitu manusia yang

mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dengan mutu kehidupan yang tinggi pula yang mencakup aspek jasmani dan kejiwaan di samping aspek spiritual.



Berbagai upaya telah dilakukan, baik itu melalui perbaikan fisik, penambahan sarana dan prasarana, ketenagaan maupun peningkatan biaya operasional. Semakin tingginya tingkat pendidikan, kesejahteraan masyarakat serta beragam pola penyakit yang ada maka tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan semakin meningkat, dilain pihak konsekuensi dan eraglobalisasi dan otonomi daerah dimana iklim kompetisi antar rumah sakit semakin meningkat, mengakibatkan RSUD DB dituntut untuk

lebih meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanannya. Untuk itu pelayanan RSUD DB perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dengan menambah fasilitas dan peralatan kesehatan, pembangunan dan pelayanan terkini yang berbasis Teknologi Informasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kehadiran aplikasi “SIMPANAN CANTIK” RSUD DB berbasis android memberikan solusi dalam upaya menurunkan angka kematian pasien di rawat jalan, IGD, maupun rawat inap. Dengan menggunakan aplikasi ini di android masing-masing DPJP maka jumlah pasien yang begitu banyak harus di layani oleh DPJP saat ini cukup hanya dalam genggamannya DPJP maka semua masalah terkait pasien dapat tertangani, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat cepat, akurat dan tepat dimanapun DPJP berada.

Aplikasi “SIMPANAN CANTIK” RSUD DB berbasis Android merupakan inovatif original yang belum pernah ada di Indonesia. Penggunaan Aplikasi Android ini sangat mudah, dan aplikasi ini terhubung dengan aplikasi SIM RS. DPJP cukup “klik”, maka seluruh data yang dibutuhkan dari pasiennya dapat terlihat di android dan jika DPJP mau memberikan advice tambahan cukup ketik di aplikasi yang ada di android maka akan langsung tersampaikan ke ruangan yang ada di RSUDDB.

B. PSC SPGDT

Kabupaten Bangka adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Bangka Belitung dan merupakan Kabupaten tertua dengan jumlah penduduk sebanyak 311.085 jiwa. Di bidang pelayanan kesehatan Kabupaten Bangka memiliki 12 unit Puskesmas 1 unit RSUD dan 2 unit rumah sakit swasta yang tersebar di daerah pesisir, perbukitan dan daerah aliran sungai. Roda perekonomian di daerah ini bergerak dari sektor pertambangan dan perkebunan.



Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang yang menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta, dan masyarakat, kondisi sehat ini tidak bisa terwujud bila terjadi penanganan kasus kegawatdaruratan yang tidak baik dalam kondisi sehari-hari maupun bencana. Kegawatdaruratan medik adalah suatu keadaan dimana seseorang berada dalam kondisi ancaman kematian baik pada kasus trauma maupun non trauma yang memerlukan pertolongan segera untuk menghindari kecacatan dan kematian.

Tingginya angka kejadian kegawatdaruratan sehari-hari tahun 2008 yaitu 80 kasus, kematian 77 kasus, luka berat 21 kasus dan luka ringan 31 jiwa

(Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka) dan belum adanya sistem dalam penanganan pertama pada kecelakaan, kemudian tingginya angka kasus penyakit tidak menular sebanyak 3825 kasus pada tahun 2010 dan tidak ada tidak adanya sistem penanggulangan kegawatdaruratan medis pra rumah sakit.

Belum adanya sistem yang bertanggung jawab terhadap transportasi standar ICU

mobil terhadap ibu hamil yang beresiko ke Fasilitas Kesehatan terdekat. Belum adanya sistem yang bertanggung jawab terhadap transportasi masyarakat miskin ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Untuk mengatasi masalah diatas maka pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka didukung oleh Pemda Kabupaten Bangka membentuk PSC SPGDT Bangka dengan jumlah SDM sebagai berikut: dokter on call 3 orang, petugas administrasi 4 orang, 16 orang kru dan didukung oleh satu unit ambulans standar ICU mobile, serta radio komunikasi yang tergabung menjadi anggota RAPI.

Pelayanan SPGDT Kabupaten Bangka terdiri dari 1) Layanan informasi kesehatan, 2) Layanan dukungan ambulans dan fasilitas gawat darurat lengkap, 3) Pelayanan rujukan ke rumah sakit, 4) Layanan Be Smart Family yaitu program tentang konsultasi masyarakat tentang masalah kegawatdaruratan agar masyarakat bisa melakukan tindakan pertolongan pertama jika terjadi kegawatdaruratan di rumah dan lingkungannya, 5) Layanan informasi ketersediaan fasilitas tempat tidur di rumah sakit, 6) Layanan aplikasi Android untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan dengan cepat dan mudah

C. SIM DATA AMPL BANGKA

Pelaksanaan pembangunan AMPL selama ini masih belum terintegrasi dengan baik. Salah satu akibatnya adalah cakupan AMPL masyarakat kita yang relatif rendah. Pada tahun 2006, baru 54,14 persen masyarakat Kabupaten Bangka yang memiliki akses terhadap air bersih dan hanya 51,43 persen masyarakat yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar. Jika tidak



mendapatkan perhatian serius, semakin tahun, kondisi ini diperkirakan akan terus memburuk. Hal ini berkaitan langsung dengan berkurangnya sumber, volume dan kualitas air bersih yang diakibatkan oleh maraknya aktivitas pertambangan timah. Penambangan tidak terkendali telah merambah ke wilayah-wilayah yang merupakan fungsi lindung dan sumber air sehingga menyebabkan jumlah luas hutan, lahan dan daerah aliran sungai kritis semakin

meningkat. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemkab Bangka mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu tindakan yang lebih nyata dengan memberikan perhatian serius dalam pembangunan sektor AMPL. Secara eksplisit, pembangunan AMPL menjadi salah satu misi dalam RPJMD 2009-2013 dan 2014-2019. Untuk pencapaian target pembangunan tersebut, tentu saja memerlukan perencanaan profesional. Perencanaan tersebut mensyaratkan data dan infrastruktur data yang handal. Data yang handal akan menghasilkan perencanaan yang benar. Perencanaan yang benar akan menghasilkan kebijakan yang benar. Pada akhirnya, implementasi kebijakan yang benar akan menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran dan efisien.

Untuk menghasilkan data yang benar, banyak SKPD yang terlibat dalam pengelolaan data AMPL. Dinas Kesehatan biasa melakukan pengumpulan data tentang kualitas air, jumlah sarana air minum dan sanitasi rumah tangga. Dinas Pekerjaan Umum melakukan pendataan sarana fisik yang dibangun oleh pemerintah. PDAM melakukan pendataan rumah tangga yang menjadi pelanggan sambungan air. Dinas Pertambangan mendata tentang sumber air yang ada di wilayahnya. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintah Desa melakukan pendataan pada jumlah pengelola sarana yang ada. BPS melakukan pendataan pada jumlah penduduk yang terlayani. Bappeda mengkoliksi keseluruhan data tersebut.

D. BUNAKTUSLAH

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara sesuai amanat UUD 1945. Namun, hingga usia 71 tahun RI, segenap masyarakatnya masih belum mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan selayaknya. Universitas Gadjah Mada, mengumumkan hasil penelitian Hasil Bantuan Siswa Miskin di Kabupaten Bangka terdapat temuan menarik. Sebanyak 47,3% responden menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31% karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4% karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya. Mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah ini sebagian besar berijazah terakhir sekolah dasar (42,1%) maupun tidak memiliki ijazah (30,7%). Meski demikian, rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata cukup besar, yakni 93,9 persen. Hanya 6,1% yang menyatakan tidak memiliki rencana untuk itu. Pendidikan merupakan investasi modal manusia (human capital investment) dan pemerintah harusnya memberi perhatian yang sungguh terhadap hal ini, terlebih dalam merespons perubahan komposisi demografi. Tingginya angka penduduk usia kerja hanya akan menjadi bonus apabila penyediaan kesempatan kerja sudah sesuai dengan jumlah penduduk usia kerja serta ditopang oleh kualitas angkatan kerja yang baik.

Untuk mencegah dan sekaligus menuntaskan permasalahan tersebut tahun 2015 Pemkab Bangka melakukan reformulasi kebijakan dengan meluncurkan program BUNAKTUSLAH (Perburuan Anak Putus Sekolah) yaitu dengan konsep pemerintah memburu anak-anak yang putus sekolah untuk di sekolahkan melalui PKBM dan Beasiswa Pendidikan. Pola lama yang hanya menunggu orang yang mendaftar ke sekolah harus dihilangkan. Pemerintah harus pro aktif memburu anak-anak yang putus sekolah dan

diedukasi agar berkeinginan untuk sekolah. Dengan Inovasi ini diyakini, pada akhir tahun 2018 seluruh masyarakat Bangka akan Bebas dari ancaman putus sekolah dan kualitas angkatan kerja akan menjadi lebih baik serta berdampak pada peningkatan nilai IPM Bangka. Dalam periode 2015, 2016, 2017 terfasilitasi masing-masing 388, 289 dan 314 anak putus sekolah yang dijaring dan diintervensi PKBM dan beasiswa pendidikan.

E. Majelis Sabtu

kondisi penataan ruang Kabupaten Bangka menunjukkan permasalahan yang serius dalam penyelenggaraan penataan ruang. pada tahun 2014 BPBD Provinsi Babel merilis ada 31 titik banjir di Kabupaten Bangka akibat Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah sempadan sungai. Disektor Usaha BP2TPM Bangka ditahun 2017 merilis ada 4479 pelaku usaha yang tidak memiliki izin operasional. Ini menyebabkan kerugian Negara yang sangat besar dimana status usaha bersifat illegal dan tidak dipungut pajak/retribusi. Dapat diketahui bahwa PAD Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 89.113.748.853,- hanya sebesar 10,48% dari total Potensi Pendapatan Daerah. Ketika pemerintah tidak dapat menjamin pemanfaatan ruang, ini akan berdampak terhadap rendahnya PAD akibat dari Kegiatan pelaku usaha tidak mendapatkan legalitas perizinan yang mana tersebut membutuhkan fatwa ruang. Permasalahan ego sektoral pemerintah daerah sendiri menjadi penyebab sulitnya para pengusaha untuk mendapatkan fatwa ruang dimana masing-masing OPD mengeluarkan fatwa teknis yang tidak terintegrasi dalam penyepakatan rekomendasi. Dampak-dampak diatas harus segera dituntaskan, kalo tidak dilakukan pendekatan strategis maka kondisi yang akan terjadi jauh lebih parah. Diperlukan suatu wadah bersifat koordinatif yang mampu menjawab permasalahan tersebut. Gagasan "MAJELIS SABTU!!"menciptakan tata kelola penataan ruang yang tadinya sektoral dan parsial, tidak memberikan titik temu rekomendasi pemanfaatan ruang jelas sehingga perizinan terhambat menjadi pendekatan koordinatif mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Dampak positif yang

dihasilkan adalah, memperoleh database pemanfaatan ruang sebagai bahan rujukan kebijakan yang diambil, bencana seperti banjir tidak terjadi secara massif seperti yang telah terjadi diKabupaten/Kota sekitar, angka indeks kepuasan masyarakat terkait program pemanfaatan ruang meningkat, dan gagasan ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perolehan PAD. MAJELIS SABTU sudah berjalan dan sudah mendapat respon dari beberapa kabupaten yang tertarik dengan gagasan ini. Intinya syarat mutlak dalam perwujudan kabupaten cermat tata ruang melalui “MAJELIS SABTU!!” ini adalah good will, dukungan kepala daerah, kemitraan, koordinasi rutin dan pemanfaatan teknologi yang berkesinambungan.

F. SI RESTI CIKAR

SI RESTI CIKAR memiliki peran penting dalam penyediaan data ibu hamil secara elektronik, karena sebelumnya pelayanan kesehatan ibu hamil tercatat dalam buku kohort manual, sehingga membutuhkan energi lebih bagi bidan untuk memetakan ibu hamil sesuai dengan faktor risiko, sedangkan jumlah ibu hamil setiap tahunnya mencapai angka di atas 6.000. Inisiatif ini memiliki dampak sangat positif bagi ibu hamil terutama ibu hamil dengan faktor risiko dan ibu hamil dengan risiko tinggi.

Ibu hamil merupakan salah satu kelompok rentan yang menjadi target prioritas dalam pelayanan kesehatan. Dengan pemetaan ibu hamil faktor risiko dan risiko tinggi, maka ibu hamil tersebut mendapatkan pendampingan secara rutin dan sesuai kebutuhan, sehingga bisa menjalani kehamilan yang sehat dan faktor risiko kehamilan bisa dikendalikan dan ditangani secara dini.

SI RESTI CIKAR membantu memastikan Ibu hamil dengan faktor risiko dan risiko tinggi mampu untuk merencanakan persalinan dengan aman dan selamat mulai dari identifikasi risiko kehamilan, keluhan selama kehamilan, rujukan jika diperlukan, pelayanan ANC yang berkualitas, USG, calon pendonor, pendamping persalinan dan penolong persalinan.

G. PINTU KITE

Aspek sosial dan ekonomi : melalui PINTU KITE terjadi peningkatan pembuatan perizinan dan nilai investasi sehingga berdampak terciptanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka. Aspek lingkungan : Lingkungan kerja menjadi nyaman, tertata dengan baik, terjalinnya kerjasama yang informatif kolaboratif integratif transparan efisien dan menciptakan suasana yang lebih kekeluargaan atas dasar kepentingan dan kemajuan bersama. Terjadinya peningkatan pembangunan, sarana dan prasarana di pedesaan, berkurangnya tingkat pengangguran sehingga menjadikan Bangka wilayah yang aman dan nyaman.

H. PORTCATWIN

Inovasi Porcatwin 5 in 1 ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan pelayanan publik, kondisi sebelumnya masih kecilnya capaian realisasi pelaporan data perkawinan secara agama islam melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Bangka, dikarenakan pelaporannya masih secara manual belum secara online dan terbatasnya sumber daya manusia di Kantor KUA. Jarak yang cukup jauh ke Dinas Dukcapil sehingga masyarakat enggan untuk mengurus Dokumen kependudukan yaitu KTP dan KK. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah

1. kemudahan dalam mendapatkan KTP, KK serta pindah jiwa bagi pasangan yang menikah di KUA karena di entry secara online. Warga tidak perlu lagi datang ke Dinas Dukcapil untuk mengurus KTP dan KK nya dikarenakan perubahan status di KTP dan KK nya, yakni dari belum kawin menjadi kawin sekaligus perubahan KK orang tuanya masing-masing karena pengurangan anggota keluarga. Kemudahan tersebut diberikan tanpa biaya serta dapat ditangani secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Hal ini dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka dalam pelayanan penerbitan

Dokumen Kependudukan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah laporan perkawinan dari KUA sebanyak 42.692

2. Manfaat lainnya yang dirasakan adalah pelaporan perkawinan dari KUA kepada Dinas Dukpencapil telah secara online tidak manual lagi. Dalam hal ini cakupan akta perkawinan realisasinya meningkat.

2.2.2. Inovasi Bidang Kolaborasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

A. NYAMAN STOP BABS (BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN) DIBALIK KOCOKAN ARISAN “IBU”



Kecamatan Bakam merupakan satu dari delapan Kecamatan di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memiliki luas wilayah 48,10 km², jumlah penduduk 16.650 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 34 Jiwa/km². Desa Kapuk merupakan desa yang terletak diujung Kecamatan Bakam dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka Barat. Desa ini memiliki luas wilayah 27,30 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 1209 Jiwa

(307 Kepala Keluarga). Mayoritas masyarakat di desa Kapuk beragama Islam, dengan penghasilan utama masyarakat saat itu bersumber tambang timah rakyat (Tambang Inkonvensional) dan sektor pertanian lada, karet dan sawit. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kapuk masih rendah, dengan 78,99% masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawah SLTP/ sederajat.

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka hingga Juni 2011, Desa Kapuk merupakan desa endemis diare dan malaria. Data menunjukkan

pada bulan Maret terjadi kasus Kejadian Luar Biasa/Penyakit Diare. Penyakit diare erat hubungannya dengan kondisi perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan/BABS sebagai cerminan bahwa cakupan jamban masyarakat di desa Kapuk yang rendah yaitu sebesar 33,02%. Desa Kapuk merupakan desa dengan cakupan jamban terendah di Kabupaten Bangka. Capaian ini masih jauh dibawah target nasional yaitu 80%.

Sanitasi lingkungan merupakan goals ke 6 (enam) dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Air Bersih dan Sanitasi, yaitu menjamin sanitasi berkelanjutan, mencapai akses sanitasi yang merata bagi semua orang serta mengakhiri defekasi terbuka, memberi perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan wanita serta kelompok rentan. Untuk mencapai target MDGs tahun 2015, bila membandingkan target dan cakupan jamban di desa Kapuk, maka cakupan jamban minimal yang harus ditingkatkan sebesar 33,49% untuk mencapai cakupan jamban di desa Kapuk minimal 66,51% pada tahun 2015.

Untuk mencapai target yang sudah ditetapkan maka dibutuhkan kerja keras. Kondisi ini menggugah kaum perempuan di desa Kapuk untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah ini, karena kelompok yang paling dirugikan dengan perilaku buang air besar disembarangan tempat adalah kelompok perempuan dan anak-anak. Selain ancaman penyakit-penyakit yang bersumber dan atau ditularkan oleh tinja secara langsung seperti diare, disentri, typhoid, bahkan 4 polio, atau ancaman penyakit secara tidak langsung akibat dari BABS seperti penyakit malaria, Filariasis (kaki gajah), demam berdarah dan lain-lain.

Ancaman lainnya yaitu digigit binatang seperti ular, kalajengking dan sebagainya. Sektor privacy perempuan sangat dirugikan, demikian juga pada anak-anak berpotensi ancaman pencabulan, pelecehan seksual hingga pemerkosaan.

Untuk mengatasi permasalahan yang diuraikan diatas, maka pihak Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan jamban di desa Kapuk dengan menerapkan metode

Community Lead Total Sanitations (CLTS) yaitu merupakan strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan menyeluruh dengan memfasilitasi masyarakat dalam menganalisis kondisi sanitasi mereka, perilaku buang air besar mereka dan konsekuensi dari hal-hal tersebut, dan pada akhirnya bertujuan untuk mencapai status ODF (Open Defecations Free) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan.

Metode CLTS yang diterapkan adalah metode CLTS terintegrasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas Bakam, Kecamatan Bakam serta Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat. Dengan kepiawaian fasilitator saat pemicuan CLTS, dengan memancing sumber daya yang ada di masyarakat sehingga muncullah inovasi "ARISAN JAMBAN

B. OJEG LANSIA

Puskesmas Penagan merupakan salah satu Puskesmas di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang masuk kategori puskesmas terpencil, memiliki wilayah kerja sebanyak empat desa, yaitu Penagan, Kota Kapur, Rukam dan Air Buluh. Sebagai satu-satunya puskesmas dengan kategori terpencil, akses menuju pelayanan kesehatan tentunya harus menjadi prioritas bagi masyarakat terutama kelompok rentan seperti lansia. Pelayanan kesehatan pada lansia merupakan satu dari dua belas indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Salah satu upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada lansia di Puskesmas Penagan adalah dengan menyelenggarakan layanan di POSYANDU LANSIA sesuai dengan standar.

Puskesmas Penagan memiliki 4 posyandu lansia dengan angka kunjungan pada tahun 2017 sebagai berikut: posyandu desa penagan sebanyak 65.47 %, Kotakapur 91,56%, Rukam 100%, Airbuluh 89,53%. Kunjungan ke posyandu desa Penagan sangat rendah sekali dibandingkan dengan 3 desa lainnya, hal ini disebabkan oleh tidak adanya anggota keluarga yang mengantar lansia untuk datang ke posyandu sesuai jadwal pelayanan karena sibuk bekerja, ada lansia yang hidup sendiri dan ada juga lansia yang tidak memiliki kendaraan, sedangkan desa Penagan merupakan desa

terpencil sehingga ketersediaan transportasi umum hanya sekali dalam satu hari. Untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada kaum lansia di Desa Penaga, maka munculah inovasi “Ojek Lansia” pada 28 Februari 2018.

Inovasi “Ojek Lansia “ bertujuan untuk menjemput lansia di wilayah desa Penagan untuk datang ke Posyandu dan mengantarkan kembali pulang ke rumah setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia.

Inovasi ini berhasil meningkatkan kunjungan lansia yang signifikan di desa penagan yaitu dari 65.47% dari 242 orang lansia di tahun 2017 meningkat menjadi 84.29% di tahun 2018 dan diharapkan bisa mencapai 100% di tahun 2019 dengan demikian Target Standar Pelayanan Minimal dapat dicapai, dan derajat kesehatan lansia meningkat.

2.2.3. Inovasi Bidang Pelayanan Publik Inklusif untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat

A. RANSEL SI DORA

Unit layanan kesehatan masih kesulitan memenuhi kebutuhan darah di Indonesia yang mencapai 5,1 juta kantong pertahun berdasarkan standar WHO tentang jumlah kebutuhan darah di Indonesia pada tahun 2017. Masyarakat sering kesulitan mencari informasi tentang darah. Untuk informasi terkait donor darah, masyarakat harus datang ke PMI, sehingga tidak efisien dan efektif. Demikian juga calon pendonor yang berniat mendonorkan darahnya tetapi tidak tahu bagaimana caranya dan tidak mengetahui informasi masyarakat yang memerlukan darah. Hal ini dikarenakan Palang Merah Indonesia (PMI) atau Unit transfusi Darah (UTD) belum mempunyai data base pendonor yang dapat diakses dengan cepat. Perlu ditemukan pemecahan masalah yang ada dengan menggagas sebuah inovasi yang menyediakan informasi layanan donor darah yang mudah di akses oleh masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan layanan donor darah di Kabupaten Bangka, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyusun strategi dengan menyediakan Aplikasi Donor Darah berbasis WEB (SI DORA) secara online

yang diluncurkan tanggal 26 Januari 2018. Dengan digagasnya SI DORA, masyarakat yang membutuhkan informasi donor darah di Kabupaten Bangka dapat mengakses informasi tersebut secara cepat dan real time, dengan mengakses web sidora.bangka.go.id. SI DORA menyajikan informasi data Stok Darah di UTDRS Depati Bahrin dan Unit Donor Darah PMI Sungailiat, data pendonor yang siap donor, identitas dan nomor kontak pendonor di wilayah Kabupaten Bangka, form registrasi calon pendonor dan informasi singkat seputar donor darah.

Sebelum adanya inovasi RANSEL SI DORA, data pendonor tersedia secara manual. Setelahnya tersedia data base pendonor secara elektronik tahun 2018 sebanyak 1.346 orang pendonor (data manual 153 pendonor). Dengan SI DORA data stok darah bisa dilihat setiap saat oleh masyarakat yang membutuhkan, sebelumnya masyarakat yang membutuhkan darah harus membuang waktu untuk datang ke PMI ataupun menghubungi PMI, serta permintaan darah yang tidak terpenuhi menurun tajam sebanyak 215 kantong dari kekurangan 670 kantong pada tahun 2017 menjadi 464 kantong pada tahun 2018.

B. SMS BUNDA CERDAS

Kabupaten Bangka memiliki Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 308243 jiwa. Berdasarkan laporan di Dinas Kesehatan Kab.Bangka tahun 2015 bahwa penanganan komplikasi pada ibu hamil yaitu 1128 (85,35%) berkaitan erat pada kasus kematian ibu, bayi, dan balita yang cukup tinggi di Kab.Bangka. jumlah seluruh ibu hamil yang diprediksi mengalami resiko tinggi dalam kehamilan terdapat 20% dari jumlah ibu hamil yang ada. Pada tahun 2015, Angka Kematian masih sangat tinggi.

Berdasarkan gambaran data Kematian Ibu AKI 188/100.000 Kelahiran Hidup, dengan jumlah kematian ibu 12 orang. Kematian Bayi (AKB) 7,5/1000 Kelahiran Hidup dengan jumlah kematian bayi 48 bayi. Kematian Balita (AKAB A) 9,5/1000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian balita mencapai angka 61 Balita. Maka itu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka merencanakan membuat suatu terobosan inovasi dalam

memecahkan masalah yang terjadi sehingga muncul ide untuk membuat Inovasi tersebut yaitu SMS Bunda Cerdas, dimana SMS Bunda Cerdas ini dijalankan di masyarakat terkhusus untuk ibu hamil dan melahirkan yang bertujuan memberikan edukasi informasi kepada ibu hamil agar mengetahui informasi – informasi tentang kehamilannya serta dapat mengetahui cara perawatan bayi baru lahir.

C. LADA PUTIH” RSUD DEPATI BAHRIN TURUNKAN AKI/AKB

RSUD Depati Bahrin adalah RSUD milik pemerintah Kabupaten Bangka yang merupakan salah satu Kabupaten dari 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh karena RSUD DB salah satu instansi penyumbang Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bangka pada periode tahun 2015 – 2016. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus kegawatdaruratan pada kehamilan, persalinan dan nifas, tidak ada data by name by address dan by case untuk ibu hamil resti se- Kabupaten Bangka, keterlambatan tim medis dalam memberikan tindakan pada kasus perdarahan, hipertensi pada kehamilan, partus macet, infeksi dan komplikasi aborsi dan tidak adanya monitoring langsung oleh dokter spesialis kandungan terhadap ibu hamil resti pada masa kehamilan maupun pada masa nifas. Begitu pula dokter spesialis anak tidak dapat memonitoring langsung kondisi bayi resti se- Kabupaten Bangka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dr. Jasminar selaku Direktur membentuk sebuah strategi all out berupa pelayanan publik yang komprehensif guna percepatan penurunan kematian ibu dan bayi resiko tinggi. Inovasi pelayanan publik tersebut penggabungan antara Program kegiatan yaitu ”Lada Putih” yang didukung dengan Aplikasi ”SiLada Putih” berbasis android yang terkoneksi dengan Command Center Kebidanan 24 jam. Aplikasi ”SiLada Putih” connecting dengan Command center kebidanan merupakan inovasi original yang belum pernah ada di Indonesia.

Adanya inovasi ini, Penanganan kasus gawat darurat obstetric dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif dan komprehensif, sejak masa

kehamilan bumil risti dan bayi dengan komplikasi sudah dilakukan pendampingan oleh dokter spesialis obgyn dan spesialis anak, penatalaksanaan tindakan oleh dokter dan tim di RSUD DB semakin cepat. Pendampingan juga dilakukan di masa nifas, selalu dipantau ketat oleh dokter tersebut. Sehingga pada tahun 2017 Jumlah kematian ibu menurun drastis, yaitu 0 (nol) kasus, dan angka kematian bayi di RSUD DB juga mengalami penurunan sangat signifikan, tahun 2017 : 27 kasus dan 2018 : 12 kasus.

2.3 PEMANFAATAN LABORATORIUM INOVASI

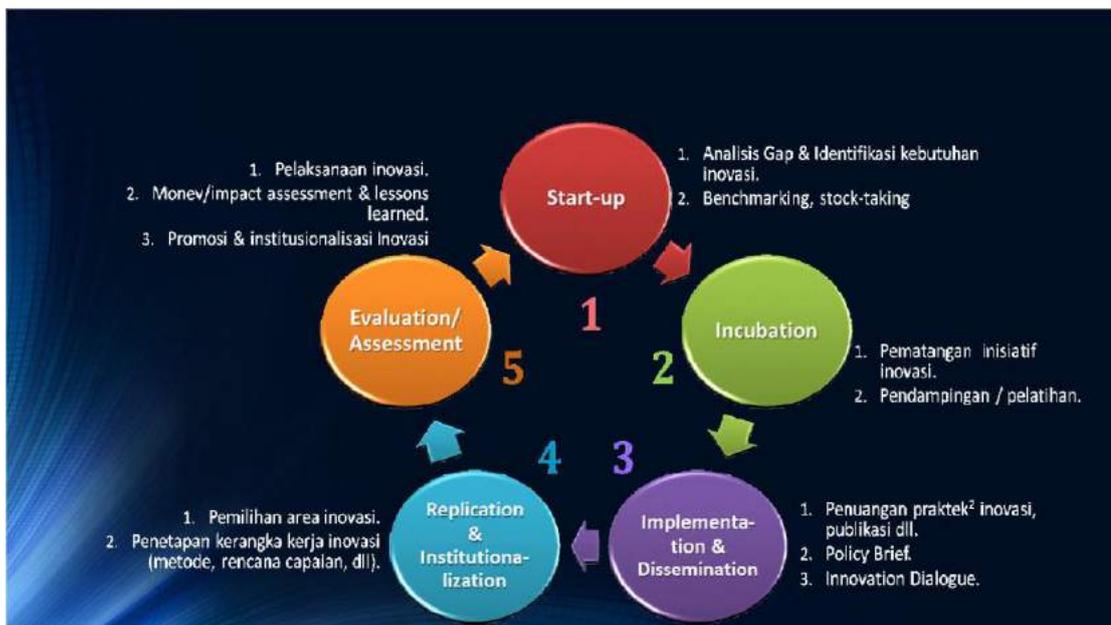
Dalam Pelaksanaan Pengembangan Inovasi Di daerah Kabupaten Bangka masih berjalan parsial. Untuk itu dibutuhkan suatu wadah bersifat kelembagaan dalam fungsi mengkoordinir, memfasilitasi, menumbukan gagasan dalam penciptaan inovasi yang tematik mendukung prioritas pembangunan. Laboratorium Inovasi diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk melaksanakan fungsi itu. Laboratorium juga berfungsi dalam penataan regulasi untuk inovasi, pembinaan, penilaian dan verifikasi inovasi.

Gambar. Skema Pemanfaatan Laboratorium Inovasi



Laboratorium Inovasi yang akan dibentuk diharapkan dapat menginspirasi pengambil kebijakan untuk mau berinovasi dan mau menggali dukungan untuk berinovasi, menggali ide-ide inovasi baik yang berangkat dari permasalahan yang dihadapi maupun untuk mewujudkan visi, merancang rencana aksi inovasi yang komprehensif dan melaksanakan inovasi secara fokus dan konsisten.

Gambar. Siklus Pemanfaatan Laboratorium Inovasi



pembentukan laboratorium inovasi juga diharapkan sebagai instrumen dalam upaya menumbuhkembangan inovasi pelayanan di daerah. Pembentukan laboratorium inovasi dalam rangka penggalian ide-ide inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan melalui tahapan drum up, diagnose, design, delivery dan display.

Hadirnya Pusat-Inovasi berupa Laboratorium inovasi ini diharapkan mampu mengakselerasi riset dan pengembangan serta bidang-bidang yang beririsan agar dapat diterapkan secara nyata, sehingga para ASN dapat berkolaborasi untuk menghasilkan penemuan knowledge baru hasil proses data analytics, teknologi dan lainnya. Laboratorium inovasi ini juga diharpkan dapat menumbuhkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi, perlu dibangun budaya kerja inovasi di

lingkungan Perangkat Daerah melalui pogram (one agency one innovation).

Sasaran LASIDA adalah :

- terbangunnya satu inovasi di setiap Perangkat Daerah dan BUMD sesuai dengan kriteria, tahapan dan jenis Inovasi;
- terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- berkembangnya inovasi melalui replikasi dan/atau transfer Inovasi;
- meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.



BAB III

MANAJEMEN LABORATORIUM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGKA

"Semuanya harus berani membalikkan bahwa orientasi kita bukan prosedur tapi hasil. Prosedur itu mengikuti. Ini harus dibalik total. Semuanya harus pada orientasi hasil, bukan prosedur,"

(Joko Widodo – www.kominfo.go.id – 5 Desember 2015)

"Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi"

(UU 23/2014 Ps. 386)

Laboratorium inovasi merupakan program pendampingan, asistensi dan fasilitasi guna mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran, semangat dan aksi nyata inovasi ASN di sektor pelayanan publik. Laboratorium inovasi Daerah (LASIDA) kabupaten Bangka di dirikan dan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangka.

Lokus kegiatan Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Bangka adalah seluruh OPD/Kecamatan sampai ke inovasi Kelurahan/ Desa.

Terdapat tiga prasyarat bagi berkembangnya inovasi pelayanan publik melalui program Laboratorium Inovasi Daerah. Pertama, adanya kesiapan Sumber Daya Aparatur. Kedua, kultur birokrasi dan kultur berinovasi yang berkembang. Ketiga, adanya dukungan dari pemimpin. Selain ketiga prasyarat tersebut, perlunya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap inovasi yang telah dilahirkan. Dikarenakan Inovasi bukanlah hal yang statis, Inovasi selalu berkembang, dan harus selalu disesuaikan dengan perubahan yang dinamis. Melalui Laboratorium inovasi ini diharapkan satu inovasi yang tercipta akan dapat melahirkan inovasi-inovasi lainnya.

Untuk menata dan melembagakan tatakelola Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Bangka, dibutuhkan manajemen yang baik sebagai proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan Laboratorium Inovasi dalam mencapai tujuan. Proses tersebut seperti menyusun rencana, membangun organisasi maupun pengorganisasian, pergerakan serta pengawasan dan pengendalian dengan cara bekerja sama dengan tim.

3.1 Fungsi *Planning* (Perencanaan) LASIDA

Fungsi manajemen *Planning* adalah kegiatan untuk menetapkan tujuan di bentuknya Laboratorium Inovasi Daerah dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budaya kerja inovasi di lingkungan Perangkat Daerah; fasilitasi, asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;

pembentukan kerjasama dalam rangka pengembangan inovasi; Dan desiminasi inovasi guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tugas tim dalam perencanaan adalah mengkaji dan mengevaluasi semua ide Inovasi OPD sebelum kemudian dijadikan dalam bentuk inovasi yang nyata. Tim Laboratorium akan memilih rencana inovasi yang paling tepat untuk dilaksanakan dan dikembangkan guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Bangka. Hal ini dikarenakan perencanaan merupakan pondasi utama yang sangat berpengaruh terhadap jalannya inovasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan tim LASIDA dalam perencanaan :

1. Menentukan arah tujuan inovasi dan target yang akan di capai dari pelaksanaan inovasi yaitu munculnya minimal satu inovasi setiap Perangkat Daerah per tahun, keikutsertaan Pemda Kabupaten Bangka dalam ajang kompetisi Inovasi nasional diantaranya SINOVIK, IGA, IDSD dan ajang kompetisi Inovasi lainnya.
2. Menyusun strategi untuk mencapai tujuan inovasi yang sudah ditentukan guna mendukung percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Bangka
3. Mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan Inovasi Daerah

3.2 Fungsi *Organizing* (Pengorganisasian) LASIDA

Fungsi manajemen LASIDA selanjutnya adalah pengorganisasian atau *Organizing* yang dapat diartikan sebagai kegiatan pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa di Kabupaten Bangka yang digunakan untuk menjalankan rencana inovasi. Perorganisasian dijalankan untuk membagi aktivitas besar menjadi aktivitas - aktivitas yang kecil yang bergabung dalam *team work* di setiap OPD. Dengan fungsi manajemen pengorganisasian ini dapat mempermudah pekerjaan Tim LASIDA untuk melakukan pengawasan dan juga menentukan SDM yang tepat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di lokasi yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka. Kegiatan yang dilaksanakan tim LASIDA dalam fungsi pengorganisasian adalah :

1. Tim LASIDA bersama Kepala OPD/ Camat/ Lurah atau Kades menentukan sumber daya dan menetapkan tugas serta prosedur yang diperlukan dalam melaksanakan rencana ide Inovasi yang sudah digelontorkan oleh masing – masing OPD/ Kecamatan/ Kelurahan/Desa
2. Tim LASIDA bersama Kepala OPD/ Camat/ Lurah atau Kades menetapkan garis wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi pelaksanaan rencana Inovasi

3. Tim LASIDA bersama Kepala OPD/ Camat/ Lurah atau Kades melakukan perekrutan, penyeleksian, pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan inovasi.

3.3 Fungsi *Directing* (pengaturan) LASIDA

Pengarahan atau *directing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tim LASIDA yang bertujuan untuk mengusahakan agar semua kelompok kerja dalam hal ini OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa dapat berusaha untuk melaksanakan Inovasinya sesuai dengan perencanaan pada awal memunculkan ide Inovasi. Pengarahan ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektifitas kerja agar maksimal dan juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis sehingga inovasi yang dilaksanakan dapat betul - betul memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bangka. Beberapa kegiatan yang dilakukan tim LASIDA untuk fungsi pengarahan yaitu :

1. Melakukan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan juga pemberian motivasi kepada tim inovasi internal OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam Inovasi
2. Tim LASIDA mengarahkan kepala OPD/Camat/ Lurah dan Kades untuk dapat memberikan tugas dan penjelasan mengenai kegiatan inovasi dengan rutin.

3.4 Fungsi *Controlling* (pengawasan) LASIDA

Tim LASIDA melakukan *Controlling* terhadap pelaksanaan Inovasi dari setiap OPD/Kecamatan/ Kelurahan/ Desa. Kegiatan ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh tim LASIDA agar inovasi tidak jalan di tempat atau malah mati suri. Kegiatan kontrol yang dilakukan tim LASIDA dengan pengawasan, supervisi dan audit. fungsi pengawasan yang dilakukan oleh tim LASIDA

1. Melakukan evaluasi keberhasilan pencapaian target berapa jumlah inovasi yang dihasilkan oleh OPD, berapa jumlah keikutsertaan Inovasi yang ada dalam ajang kompetisi Inovasi tingkat nasional.
2. Dengan pengendalian ini maka dapat dilakukan koreksi atau klarifikasi dari sejak dini jika terjadi penyimpangan pelaksanaan inovasi.
3. Memberi solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan rencana.

Fungsi pengawasan yang dilakukan tim LASIDA di sesuaikan dengan kebutuhan masing- masing OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa, yang mana di setiap lokus kegiatan Inovasi tersebut juga memiliki tim Inovasi Internal.

3.5 Unsur Manajemen Dalam LASIDA Kabupaten Bangka



3.5.1 *Man* (Sumber Daya Manusia)

LASIDA

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur manajemen paling penting dalam melaksanakan kegiatan Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Bangka.

Semua kegiatan di dalam proses laboratorium akan dijalankan oleh manusia, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan aktivitas Laboratorium Inovasi Daerah untuk mencapai tujuan inovasi dilakukan oleh manusia. Jika tidak terdapat Sumber daya manusia maka tidak akan pernah ada aktivitas di dalam Laboratorium Inovasi Daerah kabupaten Bangka.

Menurut Gaynor (2002), Sumber inovasi adalah individual, lembaga seperti perusahaan, lembaga penelitian, universitas. Diantara sumber-sumber tersebut individu merupakan sumber utama, tetapi individu tersebut hanya dapat menghasilkan inovasi apabila ada dalam organisasi yang memungkinkan terjadinya inovasi. SDM dalam melaksanakan kegiatan Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Bangka adalah Individu-individu yang dianggap mempunyai potensi untuk menghasilkan inovasi yaitu individu yang menguasai teknik-teknik pengembangan kreativitas seperti teknik brainstorming, mind

mapping, metode check lists Osborn, metode morphology, dan sebagainya. Individu-individu yang juga mempunyai potensi sebagai inovator juga memiliki sifat tertentu seperti sifat-sifat: keingintahuan yang tinggi, keterbukaan terhadap pengalaman, toleran terhadap ketidakpastian, kemandirian dalam berfikir dan bertindak dan lain-lain.

Pada program Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Bangka, Sumber Daya Manusia akan dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Laboratorium Litbang Inovasi Kabupaten Bangka Tahun 2019. Adapun Struktur Organisasi Tim Laboratorium Litbang Inovasi Kabupaten Bangka, terdiri dari : Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Tim Sekretariat. Dan Tim Teknis.

Tim laboratorium inovasi daerah Kabupaten Bangka di dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh tim Inovasi Internal Perangkat daerah yang di perkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala OPD masing- masing.

3.5.2 Money (Uang)/ Anggaran LASIDA

Dalam menjalankan kegiatannya, tim Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Bangka untuk tahun 2019, belum memiliki anggaran operasional. Namun demikian semangat tim LASIDA dalam menjalankan tugas diharapkan tidak pernah berkurang dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan Inovasi – Inovasi Daerah

Kabupaten Bangka. Sesuai arahan Kemenpan RB, Kinerja tidak harus berbasis uang. Terkait Inovasi yang dimunculkan di Perangkat Daerah, diharapkan bukan menjadi suatu beban keuangan bagi anggaran OPD yang bersangkutan, karena suatu inovasi diciptakan pada dasarnya agar pemanfaatan anggaran di OPD menjadi efektif dan efisien dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah adalah tolak ukurnya.

Namun demikian, pembangunan inovasi pada tingkat OPD biasanya tidak bisa dilepaskan dari penggunaan anggaran, dikarenakan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan inovasi tersebut memerlukan biaya operasional dan atau biasa pemeliharaan inovasi. Tersedianya anggaran yang memadai akan membuat tim inovasi internal OPD dapat lebih leluasa untuk mencapai tujuan akhir dari kegiatan inovasi yang dimaksud, sehingga bisa terwujud minimal satu inovasi setiap OPD pertahun dan keikutsertaan Pemda Kabupaten Bangka dalam kompetisi Inovasi di tingkat Nasional.

Oleh sebab itu ketersediaan anggaran merupakan hal yang harus di perhitungkan dengan tepat oleh Perangkat Daerah dalam rangka untuk mencapai tujuan minimal satu inovasi setiap OPD pertahun. Anggaran yang disediakan dijadikan sebagai biaya pembuatan, operasional dan perawatan Inovasi. Penganggaran dapat ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan dianggarkan dalam apbd dan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan. Apabila belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan inovasi daerah dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam APBD-P tahun berjalan.

Penganggaran inovasi daerah dianggarkan pada perangkat daerah yang akan melaksanakan inovasi daerah dan jika tidak menghasilkan inovasi maka tim Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Bangka bisa memberikan rekomendasi kepada tim Anggaran untuk tidak diberikan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.

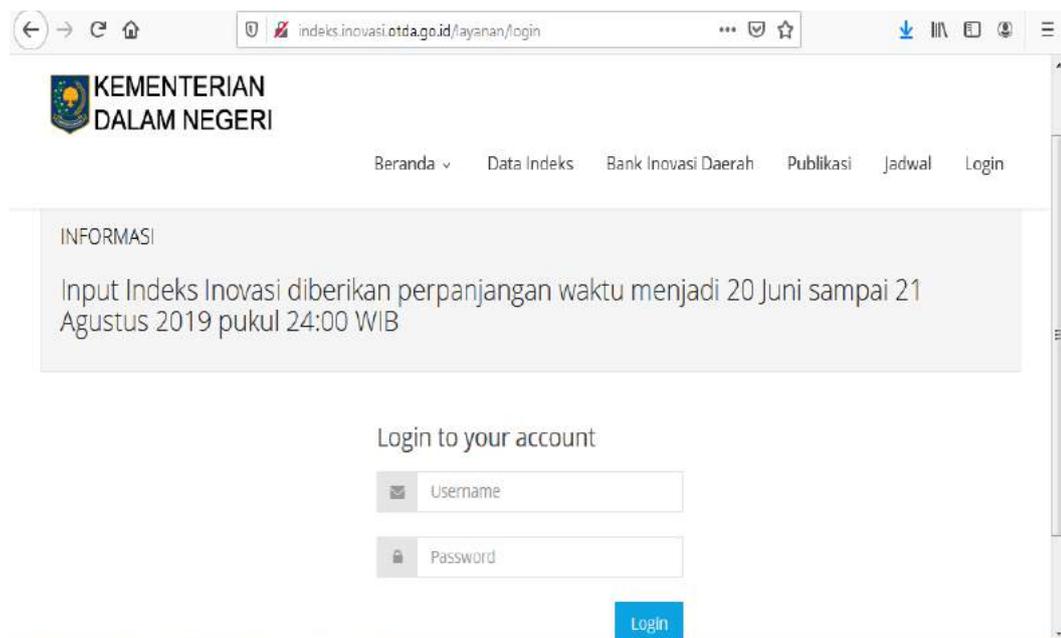
3.5.3 *Material (bahan) LASIDA*

Bahan yang dimaksud dalam program LASIDA adalah semua ide – ide yang muncul dari setiap OPD akan di terima oleh tim LASIDA lalu ide – ide tersebut akan di kembangkan oleh tim internal inovasi OPD hingga menjadi inovasi – inovasi yang siap dilaksanakan di masyarakat. Ide yang dimunculkan oleh OPD bisa ide murni ide baru dari OPD atau bisa juga merupakan adaptasi dari daerah lain yang sudah di modifikasi menjadi sebuah inovasi baru.

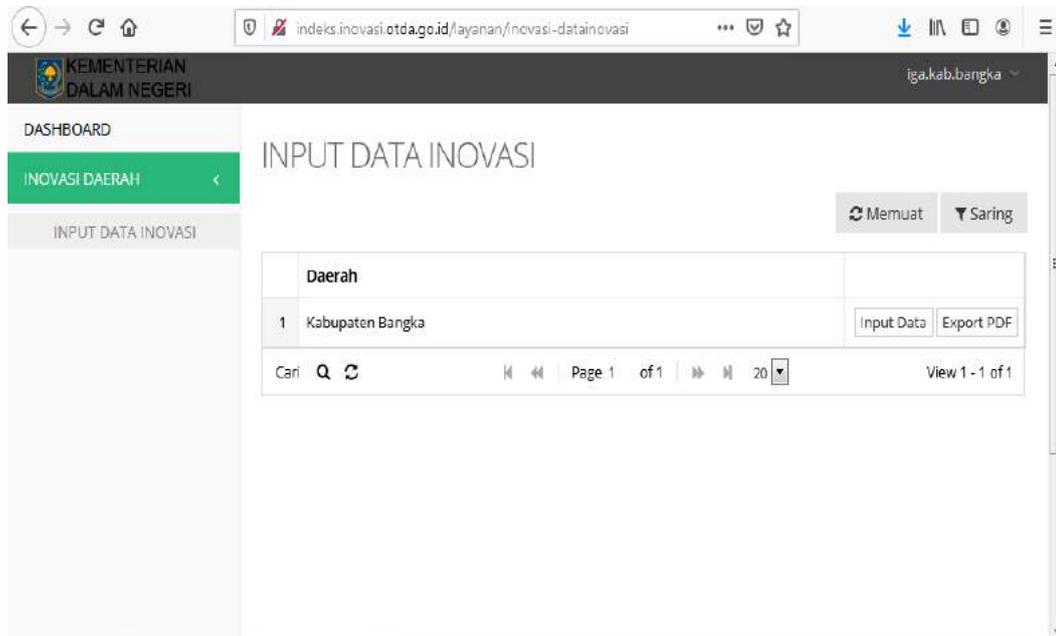
3.5.4 *Machines (mesin) LASIDA*

Kegiatan LASIDA tidak dapat dipisahkan dari unsur mesin dalam manajemen. Dalam kegiatan Laboratorium Inovasi Daerah, mesin yang digunakan dalam mencapai tujuan adalah kegiatan - kegiatan

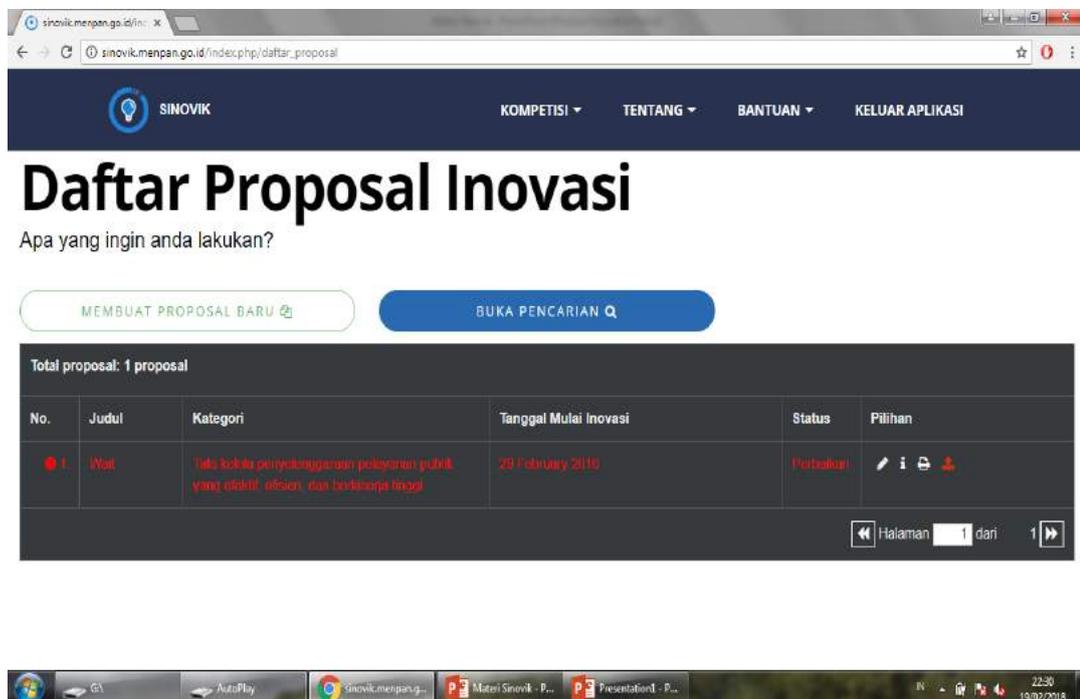
kompetisi Inovasi di tingkat Nasional seperti SINOVIK, IGA, yang mana semua kompetisi tersebut berbasis aplikasi yang harus diinput melalui komputerisasi. Berikut alamat situs Kemenpan RB dalam rangka kompetisi SINOVIK : [http:// sinovik.kemenpan.go.id](http://sinovik.kemenpan.go.id) dan alamat situs Kemendagri untuk kompetisi *Innovasi Government Award* (IGA) : indeks.inovasi.otda.go.id Selain kegiatan kompetisi Inovasi ditingkat nasional, tim LASIDA akan melakukan penilaian OPD/Kecamatan/ Kelurahan/Desa paling inovatif di setiap tahunnya.



Gambar 3.1
Aplikasi IGA (tampilan beranda)



Gambar 3.2
Aplikasi IGA (tampilan input)



Gambar 3.3
Aplikasi Sinovik

3.5.5 *Methods (metode) LASIDA*

Untuk mempermudah pengelolaan dan pelaksanaan kerja LASIDA maka diperlukan metode atau sering di sebut dengan *Standart Operating Procedure (SOP)*. Metode di gunakan sebagai cara pelaksanaan kerja LASIDA dengan mempertimbangkan tujuan, waktu dan juga fasilitas yang tersedia. Namun sebuah metode yang baik tidak akan berjalan dengan baik jika SDM yang menjalankannya tidak memiliki kemampuan dan pengalaman.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan Laboratorium Inovasi Daerah Kabupaten Bangka, sebagai berikut :

(1) *Drum up* merupakan tahapan pertama sebagai instrumen penggugah semangat bertujuan untuk menginspirasi dan mengembangkan semangat inovasi para calon inovator (*innovation practisioner*) baik secara individu maupun kolektif.

Drum up dilakukan dengan menggunakan metode antara lain :

- a. sosialisasi;
- b. kuliah umum; dan
- c. visitasi ke Perangkat Daerah dan BUMD yang telah berhasil berinovasi.

(2) *Diagnose* merupakan tahapan kedua yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan Perangkat Daerah dalam berinovasi dan memfasilitasi calon inovator (*innovation practisioner*) untuk menemukan ide inovasi yang dapat meningkatkan kinerja

organisasinya. Untuk menggali potensi dan mengerahkan segala kompetensi dalam rangka menemukan ide inovasi guna mencapai tujuan. Pada tahap *diagnose* metode yang digunakan adalah *workshop diagnose*. Berdasarkan hasil *workshop diagnose* dilakukan proses validasi ide inovasi melalui kegiatan presentasi dan review ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*).

(3) *Design* merupakan tahapan ketiga yang bertujuan untuk menghasilkan rencana aksi Inovasi termasuk pemetaan *stakeholder* berikut strategi komunikasinya. Untuk menghasilkan rencana aksi dan/atau pemetaan *stakeholder* digunakan metode *workshop*. Berdasarkan hasil *workshop design* dilakukan validasi rencana aksi inovasi melalui kegiatan presentasi dan *review* ide inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*)

(4) *Deliver* merupakan tahapan keempat yang bertujuan untuk melaksanakan Inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah didesain. Pelaksanaan inovasi diawali dengan peluncuran inovasi yang dilakukan dengan acara seremonial baik formal maupun informal. Pelaksanaan inovasi disertai dengan kegiatan monitoring untuk mengetahui berbagai kendala dan hambatan dalam implementasi inovasi agar dapat dipastikan bahwa pelaksanaan inovasi tetap berjalan sampai inovasi selesai. Kegiatan monitoring dilakukan secara langsung yaitu dengan observasi dan survey

lapangan atau secara tidak langsung yakni dengan menggunakan media komunikasi secara *online*.

(5) *Display* merupakan tahapan kelima yang bertujuan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan dan mendapatkan masukan mengenai inovasi yang telah dilakukan agar selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Kegiatan *display* dilakukan melalui :

- a. pameran inovasi;
- b. talkshow inovasi;
- c. seminar inovasi; atau
- d. gabungan dari kegiatan pada huruf a, huruf b, dan huruf c

3.5.6 Market (pasar) LASIDA

Unsur manajemen terakhir adalah Market atau pasar. Market atau pasar adalah unsur manajemen yang penting karena pasar merupakan tempat yang menentukan produk perusahaan dapat diminati atau tidak. Untuk market LASIDA adalah seluruh OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa se Kabupaten Bangka. Dalam konteks inovasi yang dihasilkan Perangkat Daerah, sasaran mereka adalah masyarakat yang menerima pelayanan publik yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.

Sasaran akhir dari kegiatan tim LASIDA adalah pemanfaatan inovasi layanan publik oleh masyarakat, sehingga masyarakat

mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. Disisi lain, keikutsertaan Pemkab Bangka dalam ajang kompetisi Inovasi tingkat Nasional, diharapkan dapat menghasilkan banyak penghargaan sehingga berdampak terhadap pemberian Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Bangka.



BAB IV

PENUTUP

Pembentukan laboratorium inovasi Daerah (LASIDA) ini adalah dalam rangka penggalan ide-ide inovasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dengan pembentukan Laboratorium Inovasi ini diharapkan ide para laskar-laskar inovasi di daerah dapat ditampung dalam laboratorium tersebut untuk diramu menjadi inovasi dalam sektor publik Serta daerah secara langsung dapat membantu meningkatkan Global Innovation Index (GII) Indonesia dan mencapai tujuan nasional, yaitu Nawa Cita dan Reformasi Birokrasi.

Pembentukan laboratorium inovasi ini diharapkan dapat melahirkan berbagai inovasi. Dimana inovasi ini nanti dapat membantu meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah. Setiap unit kerja bisa menemukan bagaimana cara melaksanakan kegiatannya agar memiliki daya ungkit yang paling besar atau dampak yang besar sehingga biaya – biaya yang dikeluarkan melalui APBD lebih efektif sehingga akuntabilitas dapat meningkat.

Pembentukan Laboratorium Inovasi ini tentunya dari tahun ke tahun akan kita tingkatkan oleh karena itu, segala jenis kritikan konstruktif yang disampaikan akan kami apresiasi setinggi-tingginya.

4.1 KESIMPULAN

Melalui laboratorium inovasi Daerah (LASIDA) yang dibentuk ini nantinya unit kerja yang ada di lingkungan pemerintah ditargetkan dapat menciptakan minimal 1 (satu) buah inovasi. Ide-ide inovasi tersebut kemudian diimplementasikan dan dimanfaatkan lebih lanjut sehingga lebih berkembang dan dapat dipergunakan sebagai model replikasi inovasi.

Laboratorium inovasi daerah (LASIDA) yang kita rencanakan jika terwujud, akan memiliki 5 tahapan atau 5D

1. kegiatan drum-up atau membangkitkan semangat untuk berinovasi.
2. kegiatan diagnose, yaitu kegiatan mengidentifikasi potensi dan kemudian memunculkan ide inovasi.
3. kegiatan design, yaitu bagaimana mendesain sebuah inovasi sampai dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh sasaran lokus.
4. tahapan delivery, yaitu melihat seperti apa rencana aksi dan memonitoring inovasi yang dijalankan.
5. tahapan display, yaitu memamerkan inovasi yang ada di lokus.

4.2 REKOMENDASI

Dalam rangka penguatan kelembagaan sistem inovasi daerah (LASIDA) yang nantinya dituangkan dalam Road Map LASIDA Kabupaten Bangka, ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

- (1) mendayagunakan segenap potensi pembangunan secara efisien guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan.
- (2) mengembangkan daya saing ekonomi daerah melalui berbagai inovasi daerah secara berkelanjutan.
- (3) memperhatikan sektor-sektor ekonomi lokal yang daya saingnya masih rendah untuk dapat didorong pertumbuhannya dengan membentuk jejaring yang kuat.
- (4) memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (5) menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor, yaitu dengan meninggalkan budaya birokrasi berlebihan dengan meningkatkan profesionalisme kerja.
- (6) memperhatikan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bangka dengan terus mendorong peran aktif masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang.

Bahan Bacaan :

1. Assink, M. (2006). "Inhibitors of disruptive innovation capability : A conceptual model". *European journal of innovation management*. Vol. 9 : 2 p 215-233
2. Aviliani, R dan Wilfridus, L. (2006). "*Membangun Kepuasan Pelanggan Melalui Kualitas Pelayanan*". *Usahawan*, No.5
3. Baumol W (2002): *The Free Market Innovation Machine*, Princeton University Press
4. Bean and Radford. (2002) *The Business of innovation : Managing the corporate imagination for maximum result*. New York, Amacom.
5. Christensen C (2002): *The Innovator's Dilemma*. Harvard Business School Press
6. Gareth R. Jones. (1999). 2nd edition. *Understanding and Managing Organizational Behavior*. USA. Addison - Wesley Publishing Company.
7. Gaynor, H Gerard (2002): *Innovation by Design*. Amacom.
8. Jones, Charles P., 2004, *Investment*, New York : Prentice-Hall
9. Pearson, Andreal E. 2003 *Tough minded ways to get innovative in harvard business school publishing corp* 2003.
10. Richards T (1997): *Creativity and Problem Solving at Work*. Gower, Aldershot
11. Romer, P. M. 2006 . Ideas and things: *The concept of production is being retooled* (The Future Surveyed: 150 Economist Years). *The Economist*: F70(3).
12. Van de Ven (2002): *The Innovation Journey*. Oxford Press

